

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat, sebagai salah satu aspek terpenting dalam pertukaran perekonomian global, termasuk di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pendapatan domestik bruto (PDB) dan penerima devisa negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh (UNWTO 2019). Fakta ini merefleksikan pergeseran paradigma di mana perjalanan dan rekreasi bukan lagi sekedar kemewahan, melainkan kebutuhan esensial yang mendorong interaksi lintas budaya dan ekonomi (Suwantoro 2004).

Secara konseptual, pariwisata diartikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Definisi pariwisata mencakup perpindahan tempat tinggal sementara yang didasari berbagai kepentingan (ekonomi, sosial, dan pengembangan), melibatkan berbagai elemen seperti wisatawan, destinasi, perjalanan, dan industri pendukung yang menjadi sumber devisa penting bagi Indonesia melalui beragam jenis wisatanya dari Sabang hingga Merauke (Suwantoro 2004).

Mengingat pentingnya strategis pariwisata, pemerintah di berbagai tingkatan telah merumuskan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mengatur dan mendorong pertumbuhannya. Di Indonesia, landasan hukum utama adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (2009), yang memberikan payung hukum bagi seluruh aktivitas kepariwisataan.

Penyelenggaraan kepariwisataan, yang bersifat multidimensi dan multidisiplin, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67

Tahun 1966 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (2011). Keberhasilan sektor ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan, tetapi juga perlu memperhatikan beberapa hal yang tertulis dalam peraturan tersebut.

Selain itu, dalam membangun pariwisata, perlu memiliki keunggulan yang menonjol, seperti keindahan alam, budaya lokal, kuliner unik, dan pengelolaan potensi serta pesona alam yang berkelanjutan (Syah Ali 2015).

Kepariwisata memiliki hubungan erat dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, muncul sebagai manifestasi dari kebutuhan setiap individu dan negara, yang didukung oleh interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, serta para pengusaha yang terlibat di sektor kepariwisataan (Syah Ali 2015).

Secara spesifik di tingkat daerah, Kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten 2018-2023 (2019) yang mana Perda ini menetapkan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mojokerto, dengan tujuan mewujudkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini menjadi panduan strategi bagi pengembangan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto termasuk potensi-potensi yang ada ditingkat desa.

Implementasi kebijakan pariwisata di tingkat daerah seringkali berfokus pada pengembangan potensi lokal yang spesifik. Kabupaten Mojokerto, dengan karakteristik geografisnya yang didominasi dataran tinggi dan berada di kaki lereng Gunung Welirang serta Gunung Penanggungan, memiliki potensi pariwisata alam yang melimpah. Kecamatan Pacet, khususnya, yang menjadi daerah wisata dan perkebunan yang potensial (Syah Ali 2015).

Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi sangat sentral. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan tempat

wisata, penyebaran informasi, promosi melalui media sosial, dan penciptaan iklim sosial yang kondusif, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal (Suryadana & Wati 2017). Menurut (Bungin 2017) masyarakat berperan aktif dalam pariwisata melalui pengelolaan tempat wisata melalui media informasi, melalui media informasi dan sosial media berperan dalam menciptakan citra positif destinasi wisata, yang berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan dan kesejahteraan ekonomi lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat politik berupa dukungan terhadap kepariwisataan, pemerintah dan dunia usaha (Soetomo 2006). Namun, pengembangan pariwisata berbasis komunitas tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal yang belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang di industri kepariwisataan (Sedarmayanti 2014) (Putra & Yulianti 2021), rendahnya partisipasi seringkali disebabkan oleh persepsi bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah semata, keterbatasan waktu, dan kurangnya kemauan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan bimbingan, penanaman nilai kesadaran, perencanaan pembangunan, pembangunan yang partisipatif dan pemahaman tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan (Jakarta. Zubaedi 2013).

Dalam mendukung pengembangan pariwisata, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, namun tidak semua masyarakat dapat berperan dalam pengembangan tersebut. Dalam proses pembangunan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berperan dalam suatu kegiatan, yaitu kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Soetomo 2006). Partisipasi dipandang sebagai kontribusi sukarela, kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, keterlibatan sukarela, suatu proses yang aktif, inisiatif dan kebebasan memilih,

pemantapan dialog dalam persiapan, pemantauan pelaksanaan, dan keterlibatan dalam pembangunan (Soetomo 2006).

Pengembangan masyarakat merupakan upaya berkelanjutan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan saling menghargai, dengan menerapkan nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, serta pembelajaran terus-menerus untuk memberdayakan masyarakat lapis bawah melalui identifikasi kebutuhan, program pembangunan, kampanye sosial, dan optimalisasi potensi lokal seperti keunggulan desa dan sektor pariwisata (Jakarta. Zubaedi 2013).

Keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal, terutama pemuda, mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pariwisata yang mengutamakan pelestarian alam, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan pemuda dalam kerja-kerja komunal di masyarakat harus didukung oleh tersedianya akses dan keterjangkauan pemuda untuk terlibat di dalamnya (A. E. A. Naharia, Baharuddin 2024).

Di antara berbagai destinasi di Pacet, salah satu destinasi wisata pegunungan yang menarik adalah Camping Outdoors dan Dolanan (COD) Tegal Klop Pacet. Wisata COD Tegal Klop merupakan salah satu destinasi wisata alam yang relatif baru namun telah menunjukkan perkembangan pesat di Kabupaten Mojokerto. Pembentukan COD berawal dari inisiatif dan visi seorang warga lokal yang melihat potensi besar dari lahan kosong di Dusun Ngeprih, Desa Pacet. Lahan tersebut, yang sebelumnya mungkin hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk pertanian atau dibiarkan kosong, memiliki karakteristik geografisnya, yang berada di ketinggian sekitar 850 mdpl dan menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau, udara yang sejuk, dan lingkungan yang masih alami, diyakini memiliki daya tarik kuat untuk kegiatan perkemahan dan aktivitas luar ruangan. Berbekal pengalaman pribadi dalam berkemah dan *ountbound*, serta didukung oleh sekelompok kecil pemuda Karang Taruna yang memiliki minat serupa, mulai merintis pengembangan area ini secara swadaya. Inisiatif awal ini didasari oleh kecintaan terhadap alam dan

keinginan untuk berbagi keindahan alam Dusun Ngeprih dengan khalayak yang lebih luas. Mereka memulai dengan membersihkan area, membuat jalur sederhana, dan menyiapkan beberapa spot untuk berkemah.

Berdasarkan fenomena diatas pengelolaan wisata ini secara spesifik diatur dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pacet, yang operasionalnya didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes) BUMDes Nomor 6 Tahun 2021 Desa Pacet. Perdes ini memberikan landasan hukum bagi BUMDes untuk mengelola aset desa dan mengembangkan unit-unit usaha pariwisata (Kusumastuti & Khoiruddin 2019). Mereka secara konsisten mempertimbangkan lahan wisata, sarana prasarana, fasilitas wisata, dan sumber daya manusia yang mendukung program pengembangan desa.

Dalam upaya mengembangkan pariwisata berbasis desa, keberadaan dan kesiapan BUMDes menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. BUMDes tidak hanya bertindak sebagai pengelola usaha, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan akselerator ekonomi lokal. Seperti studi yang dilakukan (Suprpto et al. 2022) menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan BUMDes, mulai dari perencanaan strategis, penguatan kapasitas SDM, hingga pengelolaan aset dan promosi destinasi.

Dengan mengamati potensi besar yang dimiliki COD Tegal Klopo, pengembangan wisata ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan komunitas lokal melalui peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wisata berbasis komunitas ini (Jakarta. Zubaedi 2013).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana potensi wisata COD Tegal Klopo dapat dikembangkan secara optimal demi mendorong kemajuan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata terutama para pemuda, serta menjadi acuan bagi pengelola wisata berbasis komunitas di daerah lain yang memiliki potensi serupa. Dengan menekankan potensi ekonomi dan sosial budaya yang ditawarkan oleh pariwisata, serta mengupas cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam kebijakan serta praktik pengelolaan wisata yang berbasis pada masyarakat, tidak hanya di Desa Pacet, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi yang sebanding (Jakarta. Zubaedi 2013).

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Suradiva, Muhamad, and Saryani 2018), keterlibatan pemuda dalam pengembangan desa wisata terbukti dapat memperkuat daya tahan sosial dan budaya masyarakat lokal. Di sisi lain, (Riswanda and Aesthetika, n.d.), melakukan analisis mengenai strategi komunikasi pemasaran di wisata COD Tegal Klop, yang menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pengunjung disebabkan oleh minimnya promosi dan fasilitas. Selain itu, (Lisrotul Munawaroh and Maulidah Narastri 2024) meneliti kontribusi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha lokal. Ketiga penelitian ini menyoroti aspek-aspek krusial dalam pembangunan yang berfokus pada potensi lokal: partisipasi masyarakat, pemasaran pariwisata, dan pengelolaan ekonomi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan dan memperluas ruang lingkup dari penelitian-penelitian tersebut, dengan perhatian khusus pada pengembangan masyarakat desa melalui potensi wisata alam di COD Tegal Klop, serta kolaborasi antara pemerintah desa, pemuda, dan BUMDes dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas. Dengan menjadikan penelitian ini sebagai lanjutan dan perluasan dari studi sebelumnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai cara memanfaatkan potensi alam wisata untuk pemberdayaan masyarakat lokal secara maksimal.

Penelitian ini memiliki pentingnya tersendiri karena selain menekankan potensi ekonomi dan sosial budaya yang ditawarkan oleh pariwisata, juga mengupas cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam kebijakan serta praktik pengelolaan wisata yang berbasis pada masyarakat, tidak hanya di Desa Pacet, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi yang sebanding.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran pemerintahan desa pacet dalam pengembangan masyarakat melalui potensi alam wisata camping outdoor dolanan tegal klopok?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis pengelolaan wisata COD Tegal Klopok oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan masyarakat Desa Pacet, dengan meninjau dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang diinginkan oleh penulis. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Dari penelitian yang telah dilakukan penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan studi pembangunan masyarakat desa, khususnya dalam konteks pengelolaan potensi wisata berbasis komunitas. penelitian ini memperluas pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat,

keadilan sosial, dan pemberdayaan lokal sebagai fondasi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik di bidang kepariwisataan, pemerintahan desa, dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti, akademisi, maupun mahasiswa yang tertarik meneliti topik serupa di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau solusi dalam berbagai kebijakan yang dibuat.
- b. Bagi pengelola wisata (BUMDes dan Pengelola Wisata COD Tegal Klop), dapat memberikan masukan strategis untuk peningkatan fasilitas, promosi, manajemen, dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan lebih memahami wisatawan serta kolaborasi antar berbagai pihak yang dijamin.
- c. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan panduan untuk mengembangkan usaha mikro berbasis wisata.
- d. Bagi para peneliti, diharapkan menjadikan sumber rujukan dan tambahan atas referensi untuk berbagai pihak.